



**LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2017**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, karena atas perkenanNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini.

Laporan SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada SK Kepala LAN yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI), selain itu sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (**good governance and clean government**) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam Laporan SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai dengan mempergunakan tolak ukur, baik berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan sebagai satu kesatuan akuntabilitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan SAKIP dimasa datang.

Masamba, Januari 2017

Kepala Dinas,



MUHAMMAD NUR, SE
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19621231 199610 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Keadaan Pegawai	4
1.4 Sarana dan Prasarana	8
1.5 Sistematika Laporan SAKIP	14
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Visi dan Misi	16
2.2 Tujuan dan Sasaran	17
2.3 Program	22
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2017	25
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	27
3.1.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja SKPD Tahun ini dengan tahun lalu	30
3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian kinerja SKPD Tahun 2017 di bandingkan Target Akhir RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021	31
3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ...	32
3.1.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV: PENUTUP	40
4.1 Tinjauan Umum	40
4.2 Saran dan Tindak Lanjut	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Jabatan	4
1.2 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan tingkat pendidikan	5
1.3 Tabel Jumlah pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan golongan	6
1.4 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	7
1.5 Tabel Rekapitulasi Bangunan / Gedung Pada UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	8
1.6 Tabel Rekapitulasi Peralatan Operasional Pelatihan UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	11
1.7 Tabel Rekapitulasi Peralatan Pada Kantor UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	11
1.8 Tabel Rekapitulasi Peralatan pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	13
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tabel Indikator dan Target Kinerja Sasaran Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021	20
2.2 Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	21
2.3 Tabel Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2017 untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	24

2.4 Tabel Rencana Belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	25
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
3.2 Tabel Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	27
3.3 Tabel Rumus Formulasi Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	29
3.4 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dan Tahun 2017	30
3.5 Tabel Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Utara	31
3.6 Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Sasaran Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	34
3.7 Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	35
3.8 Tabel Target Realisasi Belanja Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017	36

BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan SAKIP secara periodik.

Penyusunan Laporan SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara tahun 2017 yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara;
2. Mendorong Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan , kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Distranker untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349). Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun pada Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, bahwa dalam menjalankan tugasnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan administrasi bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
4. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat/Sekertaris Dinas terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - a. Seksi Penyiapan Areal Permukiman Transmigrasi
 - b. Seksi Perencanaan Teknis Ket transmigrasian
 - c. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
4. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi.
5. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - a. Seksi Penempatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
 - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Bidang Hubungan Industrial
 - a. Seksi Pembinaan Perselisihan Hubungan Industrial
 - b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Persyaratan Kerja
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

1.3. Keadaan Pegawai

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 45 orang yang terdiri atas 35 orang yang berkantor pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 10 orang (yang berkantor pada UPTD Balai Latihan Kerja). Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, golongan dan keikutsertaan dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
berdasarkan Jabatan

NO.	KANTOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	17	18	35
-	Eselon II B	1	-	1
-	Eselon III A	1	-	1
-	Eselon III B	2	2	4
-	Eselon IV A	7	8	15
-	Staf	6	8	14
2	UPTD BLK	6	4	10
-	Eselon IV A	1	-	1
-	Staf	5	4	9
	JUMLAH KESELURUHAN	23	22	45

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pejabat struktural Distranker yang Eselon III dan EselonIV terdiri atas 11 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Adapun jumlah keseluruhan pegawai baik yang berkantor di Distranker maupun di UPTD BLK masing-masing sebanyak 51,11% untuk jumlah laki-laki dan 48,89% untuk jumlah perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Distranker Luwu Utara.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	KANTOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DINAS DAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	17	18	35
-	Pasca Sarjana (S2)	1	2	3
-	Sarjana (S1)	9	14	23
-	Diploma (D3)	1	1	2
-	SLTA	6	1	7
2.	UPTD BLK	6	4	10
-	Sarjana (S1)	5	2	7
-	Diploma (D2)	-	1	1
-	SLTA	1	1	2

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari seluruh pegawai yaitu sebanyak 45 orang (100%) baik yang berkantor di Distranker maupun di UPTD BLK yang berpendidikan Pasca Sarjana sebanyak 3 orang (6,67%), yang berpendidikan S1 sebanyak 30 orang (66,66%), yang berpendidikan Diploma sebanyak 3 orang (6,67%), dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang (20%). Hal ini menunjukkan

bahwa pegawai terdapat pada Distranker Kab. Luwu Utara dengan pendidikan yang dimilikinya / sebagian besar berpendidikan sarjana, maka akan sangat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
berdasarkan Golongan

NO.	KANTOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU UTARA	17	18	35
-	Golongan IV	3	1	4
-	Golongan III	9	15	24
-	Golongan II	5	2	7
-	Golongan I	-	-	-
2	UPTD BLK	6	4	10
-	Golongan III	3	2	5
-	Golongan II	3	2	5

Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa dari seluruh pegawai yaitu sebanyak 45 orang (100%) baik yang berkantor di Distranker maupun di UPTD BLK yang bergolongan IV sebanyak 4 orang (8,89%), yang bergolongan III sebanyak 29 orang (64,44%), yang bergolongan II sebanyak 12 orang (26,67%).

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO.	KANTOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU UTARA	2	4	6
-	Diklatpim II	1	-	1
-	Diklatpim III	1	1	2
-	Diklatpim IV	-	3	3
2	UPTD BLK	-	-	-
-	Diklatpim IV	-	-	-

Dari tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa dari 22 orang pegawai (pejabat) yang berada di Distranker dan UPTD BLK, hanya sebanyak 6 orang (27,27%) yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan.

1.3.1. Jumlah Ideal Pegawai dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

Kebutuhan pegawai (hasil dari Analisis Beban Kerja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2017, menghasilkan Peta Jabatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Adapun hasil dari peta jabatan tersebut adalah :

- Posisi jabatan struktural kebutuhan pegawai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebanyak 21 orang , dan yang yang terisi sudah cukup (21 orang), dan posisi jabatan struktural pada UPTD BLK dibutuhkan sebanyak 2 orang, namun yang sudah terisi 1 orang.
- Posisi jabatan sebagai Staf yang berkantor pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, idealnya adalah sebanyak 39 orang, namun

jumlah Staf yang ada saat ini hanya sekitar 14 orang, sehingga masih kekurangan personil sebanyak 25 orang.

- Pada UPTD BLK jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan beban kerja yang ada adalah sebanyak 16 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 10 orang, sehingga masih kekurangan sebanyak 6 orang pegawai.

1.4. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun sejak Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka secara tidak langsung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara memiliki asset yang cukup besar, yaitu :

1. Tanah

Luas tanah UPTD BLK adalah 10 Ha.

2. Bangunan / Gedung

Bangunan/ gedung yang terdapat UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Bangunan / Gedung
Pada UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

NO	PRASARANA	JUMLAH UNIT	LUAS AREA BANGUNAN (M ²)	KAPASITAS (ORANG)	KONDISI	KET
1	KANTOR	1 UNIT	1000 M ²	120	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	

2	ASRAMA	1 UNIT	3000 M ²	50	☐ Baik ☐ Cukup ☒ Perlu perbaikan ☐ Rusak	10 Kamar
3	RUMAH IBADAH	1 UNIT	200 M ²	100	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
4	SARANA OLAH RAGA	1 UNIT	500 M ²	100	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	Lapangan Tennis
5	AULA	1 UNIT	800 M ²	500	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	Aula Nusantara
6	LABORATORIUM QUALITY CONTROL	1 UNIT	80 M ²	10	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
7	RUMAH JABATAN	4 UNIT	150 M ²	24	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
8	POS KEAMANAN	1 UNIT	16 M ²	6	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
9	WORKSHOP I	1 UNIT	1000 M ²	150	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	Menjahit, otomotif, PHP, Instalasi Listrik, Pendingin
10	WORKSHOP II	1 UNIT	1500 M ²	100	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	Las listrik, Kontruksi Meubel

11	WORKSHOP KET. TATA RIAS	1 UNIT	48 M ²	20	☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
12	JALAN LINGKAR ASPAL		1,2 KM		☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
13	PENAMPUNGAN AIR BERSIH	1 UNIT	8 M ²		☒ Baik ☐ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	
14	DAPUR UMUM	1 UNIT	80 M ²	50	☐ Baik ☒ Cukup ☐ Perlu perbaikan ☐ Rusak	

3. Sarana Transportasi / mobilitas kantor :

Dalam hal ini adalah jumlah kendaraan mobil dan motor yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja termasuk pula UPTD BLK, yaitu :

- Mobil Dinas sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) unit pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 1 (satu) unit pada UPTD BLK.
- Mobil Box sebanyak 1 (satu) unit pada UPTD BLK.
- Mobil Training Unit (MTU) sebanyak 2 (dua) unit pada UPTD BLK.
- Sepeda Motor sebanyak 8 (delapan) unit, 3 (lima) unit pada UPTD BLK dan 5 (lima) unit pada kantor Distranker.

4. Peralatan penunjang operasional pelatihan dan kantor UPTD BLK

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan di UPTD BLK, maka terdapat beberapa peralatan penunjang operasional maupun peralatan kantor yang

terdapat pada bangunan UPTD BLK, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Rekapitulasi Peralatan Operasional Pelatihan
UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Peralatan Keterampilan Las Listik	1 Set
2	Peralatan Keterampilan Listrik Penerangan / Pendingin	1 Set
3	Peralatan Keterampilan Meubeler Kayu	1 Set
4	Peralatan Keterampilan Automotif	1 Set
5	Peralatan Aneka Kejuruan Tata Rias	1 Set
6	Peralatan Keterampilan Menjahit	1 Set
7	Peralatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Set
8	Peralatan Keterampilan Processing Hasil Pertanian	1 Set
9	Peralatan Laboratorium Quality Kontrol	1 Set

Tabel 1.7
Rekapitulasi Peralatan pada
Kantor UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
1	Mesin Ketik Listrik Longewagon	2 Buah	-
2	Mesin Ketik Listrik Longewagon	2 Buah	-
3	Lemari Besi	1 Buah	Lemari Besi Metal
4	Mesin Absensi	1 Buah	-

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
5	Filling Besi/Metal	2 Buah	-
6	Band Kas	1 Buah	Brangkas
7	Lemari Kayu	4 Buah	Lemari Arsip Tinggi 3 Pintu
8	Meja Tulis	11 Buah	Meja Kantor
9	Meja Panjang	16 Buah	Meja Panitia
10	Kursi Tamu	8 Buah	-
11	Kursi Putar	3 Buah	-
12	Kursi Biasa	1 Buah	-
13	Meja Komputer	16 Buah	maja komputer 1/2 biro
14	Tenda	1 Buah	tenda besi 3 petak ,panjang petak 4 m dan lebar petak 7 meter
15	Meja 1/2 Biro	9 Buah	Meja 1/2 Biro
16	Kursi Plastik	1 Buah	Kursi Plastik 100 Buah (Rusak Berat 84 bh)
17	Mesin Potong Rumput	4 Buah	Mesin Babat Rumput
18	AC Split	14 Buah	-
19	Televisi	1 Buah	TV 21 inc
20	Loudspeaker	2 Buah	Speker
21	Sound System	1 Buah	-
22	Note Book	2 Buah	-
23	Printer	9 Buah	-
24	Scanner	1 Buah	-
25	Monitor	22 Buah	-
26	Meja Kerja Pejabat	3 Buah	Meja Kerja Pejabat

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12 Buah	Meja 1/2 Biro
28	Kursi Kerja Pejabat	11 Buah	-
29	Proyektor + Attachment	2 Buah	-
30	Microphone/Wireless Mic	1 Buah	-
31	Personal Komputer	13 Buah	-
32	Peralatan Dapur	1 Set	-
33	Peralatan Kamar Tamu Pejabat	1 Set	-

5. Peralatan penunjang pelayanan pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Rekapitulasi Peralatan pada
Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	Motor	3	√	-	-
2	Timbangan	1	√	-	-
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	-	-	√
4	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	√	-	-
5	Brand Kas	1	√	-	-
6	Lemari kayu	32	√	-	-
7	Kulkas	1	√	-	-
8	AC Split	4	√	-	-
9	AC Split	4	-	-	√
10	Kursi Rapat	48	√	-	-
11	Kursi Tamu	1	-	√	-
12	Kursi Tamu	1	√	-	-

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
13	Kursi Putar	3	√	-	-
14	Kursi Lipat	1	√	-	-
15	Meja 1/2 Biro	17	√	-	-
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	√	-	-
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	√	-	-
19	Lemari Arsip Dinamis	1	√	-	-
20	Filling Cabinet	6	√	-	-
21	Note Book	1	-	-	√
22	Lap Top	5	√	-	-
23	Lap Top	1	-	√	-
24	PC Tablet	1	√	-	-
25	Printer	3	√	-	-
26	Printer	3	√	-	-

1.5. Sistematika Laporan SAKIP

Sistematika penyajian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang alasan disusunnya Laporan SAKIP, Struktur Organisasi dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD baik terkait konsisi pegawai maupun asset/ sarana dan prasarana SKPD, dan Sistematika Laporan SAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat tujuan sasaran utama yang ingin diraih

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Selain itu disajikan pula program dan kegiatan yang mendukung indikator capaian sasaran tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisi akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini disajikan simpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

- Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh SKPD di masa mendatang.

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 yaitu : “ ***Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal*** ”, dan misi RPJMD yang keenam yaitu : “***Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah***”. Berdasarkan visi dan misi tersebut serta analisis permasalahan pokok terkait bidang transmigrasi dan tenaga kerja, maka Visi penyelenggaraan pembangunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara Tahun 2017 - 2021 adalah “ ***Terwujudnya Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif dan Berkualitas*** ”.

Dengan visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, maka dapat diberikan penjabaran tentang pengertian dari visi tersebut, yaitu :

Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif adalah bagaimana para transmigran maupun para tenaga kerja memiliki sikap yang terus ingin berkarya atau menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sesuai dengan kemampuan, keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya.

Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berkualitas

adalah bagaimana para masyarakat transmigrasi dan tenaga kerja mempunyai kualitas yang baik (bermutu) baik dalam hal apa yang telah diproduksinya, maupun kualitas hidupnya. Kualitas hidup ini dalam artian adanya rasa aman dan nyaman baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun tempat kerjanya, serta kualitas dalam mendapatkan pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya.

- Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Untuk mewujudkan visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara tersebut diatas, maka dirumuskan pula Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
2. Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi pertama yaitu “Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja”.

Tujuan : Meningkatkan kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Sasaran :

- Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
- Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif

2. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi kedua yaitu “Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi”.

Tujuan : Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi.

Sasaran :

Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi.

3. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja”.

Tujuannya : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan kerja.

Sasaran :

- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan.
- Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.

4. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi keempat yaitu “Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan”.

Tujuan : Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan.

Sasaran :

- Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha.
- Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun rencana strategis yang akan dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator dan Target Kinerja Sasaran
Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KENERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Laporan Keuangan Kategori BPK RI (WTP / WDP / DISCLAIMER)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker	CC	CC	B	B	B	B
3	Jumlah Transmigran Binaan	600 KK	600 KK	200 KK	200 KK	300 KK	300 KK
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	2,55%	2,40%	2,30%	2,22%	2,10%
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	86,50%	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%
6	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi / Masyarakat	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	70,00%	70,00%
7	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	19,75%	25,20%	31,44%	35,99%	46,71%	50,00%
8	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
9	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
10	Jumlah Perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan	235 buah	240 buah	245 buah	245 buah	250 buah	255 buah

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan
berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 yang

mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Mengacu pada visi dan misi Distranker yang telah ditetapkan maka Tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2017, akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017
I.	Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja	1. Meningkatnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien	1.1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan Kategori BPK RI (WTP / WDP / DISCLAIMER)	WTP
			1.2. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker (dalam Huruf)	CC
II.	Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi	2. Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi	2.1. Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Jumlah transmigran binaan	600 KK
III.	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan	3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan	3.1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka Rasio Penduduk yang Bekerja	2,55% 87,00%

	kerja.	kerja	3.2. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	65%
			3.3. Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	25,20%
IV.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	4. Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan.	4.1. Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%
			4.2. Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek Jumlah Perusahaan menerapkan BPJS	50% 240 buah

2.3. Program

Berdasarkan tujuan diatas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara menetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator capaian yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Adapun beberapa Program dan Kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2017 yaitu:

1. Program Prioritas Utama sebanyak 5 (lima) program yaitu :
 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan
 - b. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah , Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - c. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
2. Program Transmigrasi Lokal, dengan kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - b. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur , penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - c. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
2. Program Rutin/ Penunjang sebanyak 6 (enam) program yaitu :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Tabel 2.3
Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2017 untuk
Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017	Program Pendukung Capaian Sasaran
I.	1.1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan Kategori BPK RI (WTP / WDP / DISCLAIMER)	WTP	6 (enam) Program rutin / Penunjang : Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program peningkatan pelayanan kedinasan
	1.2. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker (dalam Huruf)	CC	
II.	2.2 Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Jumlah transmigran binaan	600 KK	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal
III.	3.4. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka Rasio Penduduk yang Bekerja	2,55% 87,00%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	3.5. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	65%	
	3.6. Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	25,20%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
IV.	4.3. Tercapainya ketenagaaan dalam bekerja dan berusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	4.4. Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek Jumlah Perusahaan menerapkan BPJS	50% 240 buah	

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2017

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBD dengan target sebesar Rp. 8.765.067.500,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Rencana belanja tahun anggaran 2017 pada setiap program / kegiatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Rencana Belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

NO	PROGRAM	BELANJA	%
		ANGGARAN (Rp)	
-	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.807.767.500	32,03
-	BELANJA LANGSUNG	5.957.300.000	67,97
	JUMLAH	8.765.067.500	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara. Dimana penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*Performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*Performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Distranker tahun 2017 yang telah disepakati / ditetapkan. Penilaian ini dilakukan secara tim untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua

4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Distranker Kab. Luwu Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Distranker beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA / KODE
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan Kategori BPK RI	WTP/ WDP/ DISCLAIMER	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik
	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker	Huruf	CC	CC	100,00	Sangat Baik
2	Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Jumlah Transmigran Binaan	KK	600	150	25,00	Tinggi
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	3,31	70,20	Sedang
		Rasio Penduduk yang Bekerja	%	87,00	96,69	111,14	Sangat Baik

4	Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan produktif melalui pelatihan	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi / Masyarakat	%	65,00	53,56	82,40	Tinggi
5	Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	25,20	7,15	28,37	Sangat Rendah
6	Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50,00	100,00	200,00	Sangat Baik
7	Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	50,00	23,76	47,52	Sangat Rendah
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Buah	240	471	196,25	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, maka capaian indikator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari 6 sasaran strategis yang masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Namun, ada 2 sasaran startegis yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator kinerja.
- Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditargetkan terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori kinerja "Sangat Baik", 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori kinerja "Tinggi", 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori kinerja "Sedang", dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori kinerja "Sangat Rendah".

- c. Realisasi capaian kinerja yang dihasilkan dipengaruhi oleh formulasi rumus indikator sasaran, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumus Formulasi Capaian Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUS		HASIL
1	Jumlah transmigrasi binaan	Jumlah warga transmigrasi yang dibina (KK)	-	150 KK
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur terbuka usia angkata kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{4841}{146270} \times 100\%$	3,31%
3	Rasio Penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja usia 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{141429}{146270} \times 100\%$	96,69%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat}} \times 100\%$	$\frac{256}{478} \times 100\%$	53,56%
5	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{147}{2057} \times 100\%$	7,15%
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan melalui PB}}{\sum \text{kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	$\frac{918}{3863} \times 100\%$	23,76%
8	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan (buah)	-	471 Buah

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja SKPD tahun ini dengan tahun lalu.

Berikut penyajian tabel untuk melihat perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 dan Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SAT	REALISASI 2016	REALISASI 2017	KET
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan Kategori BPK RI	WTP/ WDP/ DISCL AIMER	WTP	WTP	Capaian 2016 sama dengan 2017
	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker	Huruf	CC	CC	Capaian 2016 sama dengan 2017
2	Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Jumlah Transmigran Binaan	KK	50	150	Capaian 2017 lebih baik daripada 2016
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,60	3,31	Capaian 2016 lebih baik daripada 2017 dimana 2017 TPT bertambah
		Rasio Penduduk yang Bekerja	%	97,40	96,69	Capaian 2016 lebih baik daripada 2017 dimana 2017 Rasio yang bekerja berkurang
4	Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan produktif melalui pelatihan	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi / Masyarakat	%	81,09	53,56	Capaian 2016 lebih baik daripada 2017

5	Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	36,95	7,15	Capaian 2016 lebih baik daripada 2017
6	Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00	100,00	Capaian 2016 sama dengan 2017
7	Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	22,81	23,76	Capaian 2017 lebih baik daripada 2016
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Buah	369	471	Capaian 2017 lebih baik daripada 2016

3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian kinerja SKPD Tahun 2017 dibandingkan Target Akhir RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 - 2021 sebanyak 4 (empat) indikator , dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Utara

NO.	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S.D TAHUN INI	% CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10%	3,31%	42,38
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	89,00%	96,69%	108,64

3	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	50,00%	7,15%	14,30
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	255 Buah	471 Buah	184,71

3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat kendala / masalah yang dihadapi sehingga realisasi capaian kinerja mengalami kegagalan / penurunan kinerja daripada target yang ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- Untuk sasaran kinerja “Jumlah warga transmigrasi yang dibina” terealisasi 150 KK dari target 600 KK : Rencana awal Target 600 KK merupakan jumlah total transmigran untuk 6 UPT (Lantang Tallang, Maipi, Sepakat, Buso, Bantimurung, dan Pongkase), sementara untuk tahun 2017 ini 5 (lima) UPT (Maipi, Sepakat, Buso, Bantimurung dan Pongkase) sudah bukan merupakan transmigran binaan, dan yang masih menjadi transmigran binaan hanya UPT. Lantang Tallang dengan jumlah Kepala Keluarga yang telah diberikan bantuan pembinaan sebanyak 150 KK.
- Untuk sasaran kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” (TPT) dimana target TPT 2,55% terealisasi 3,31%, hal ini menunjukkan terdapat 0,76% penambahan TPT (realisasi bertambah namun berkategori negatif), dan Untuk sasaran “Persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan” dimana target 25,20% teralisasi hanya 7,15%. Kedua indikator ini mempunyai keterkaitan, dimana masalah yang dihadapi terhadap pencapaian kinerja tersebut adalah :
 - Jumlah pencari kerja (berdasarkan pelayanan kartu kuning) sampai tgl 31 desember 2017 sebanyak 2057 orang sedangkan yang melapor telah ditempatkan hanya 147 orang.
 - Data tersebut diatas menunjukkan bahwa lapangan kerja / kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, disamping itu pencari yang tidak ditempatkan tetap menjadi

penduduk dengan kategori pengangguran sehingga angka pengangguran menjadi bertambah.

- Upaya yang dilakukan terhadap 2 capaian kinerja tersebut diatas adalah :
 - 1) Pelatihan pada UPTD BLK, baik secara institusional, MTU (mobile training unit), maupun Pelatihan swadana oleh Pemerintah Desa maupun swadana masyarakat.
 - 2) Pemberian bantuan peralatan untuk tenaga kerja / kelompok masyarakat guna menyerap tenaga kerja baru / peningkatan lapangan kerja sektor informal.
- Untuk sasaran kinerja "Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek" , dimana target 50% namun yang terealisasi hanya 23,76%. Hal ini disebabkan Total perusahaan di Kab. Luwu Utara baik Perusahaan Jasa Konstruksi dan Non konstruksi terdapat sebanyak 802 buah, dan perusahaan yang telah menerapkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 471 Buah dan yang belum menerapkan sebanyak 331 Perusahaan , sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah persentase tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Upaya yang dilakukan terhadap capaian kinerja tersebut diatas adalah :
 - 1) Telah Menyampaikan secara langsung kepada pengusaha ketika melaksanakan monev dilapangan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Telah melaksanakan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan sosialisasi kepada perusahaan baik perusahaan jasa konstruksi maupun non konstruksi.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Sasaran Strategis
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

No	Sasaran	Program Pendukung Capaian Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase
I.	1.2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	6 (enam) Program rutin / Penunjang : Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program peningkatan pelayanan kedinasan	1.660.850.000	27,88%
	1.2. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif			
II.	2.3 Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal	833.550.000	13,99%
III.	3.7. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.800.500.000	47,01%
	3.8. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan			
	3.9. Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	201.600.000	3,38%
IV.	4.5. Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	460.800.000	7,74%
	4.6. Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja			
Jumlah Anggaran Belanja Langsung			5.957.300.000	100%

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

Sasaran	Anggaran Program (Rp)	Realisasi Anggaran Program (Rp)	% Serapan Anggaran	Capaian Kinerja	Keterangan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	1.660.850.000	1.655.102.546	99,65	100	Efisien
Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif				100	Efisien
Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	833.550.000	816.640.300	97,97	25,00	Tidak Efisien
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	2.400.500.000	2.398.398.940	99,91	90,67	Efisien
Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan	400.000.000	399.918.250	99,98	82,40	Efisien
Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	201.600.000	201.568.000	99,98	28,37	Tidak Efisien
Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	225.000.000	218.194.500	96,98	200,00	Sangat Efisien
Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	235.800.000	235.719.850	99,97	121,89	Sangat Efisien

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja
Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017

NO	PROGRAM	BELANJA		%
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
-	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.807.767.500	2.773.434.524	98,78
	Belanja Pegawai	2.807.767.500	2.773.434.524	98,78
-	Gaji Pegawai	2.368.595.000	2.368.012.024	99,97
-	Tambahan Penghasilan PNS	438.922.500	405.422.500	91,84
-	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi daerah	250.000	-	-
-	BELANJA LANGSUNG	5.957.300.000	5.925.372.336	99,46
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.135.037.760	1.131.276.060	99,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	999.000	99,90
	Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.300.000	57.362.000	98,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.767.760	14.767.760	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	117.600.000	117.600.000	100,00
	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.660.000	15.275.000	97,54
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	356.150.000	354.478.100	99,53
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset	562.560.000	561.794.200	99,86

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181.550.990	180.792.790	99,58
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	35.900.000	35.824.000	99,79
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.770.000	42.770.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	64.213.230	64.213.230	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	14.667.760	13.985.560	95,35
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.894.000	20.894.000	100,00
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	20.894.000	20.894.000	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68.200.000	67.047.446	98,31
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.200.000	67.047.446	98,31
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	224.347.250	224.347.250	100,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	204.347.250	204.347.250	100,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	30.820.000	30.745.000	99,76
	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/ Muspida/ Penjabat Pemerintahan Tingkat Atas/Unit Kinerja Terkait	30.820.000	30.745.000	99,76
7	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	783.550.000	766.640.300	97,84

	Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan	151.000.000	150.439.500	99,63
	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku, antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	235.850.000	220.219.000	93,37
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	396.700.000	395.981.800	99,82
8	Program Transmigrasi Lokal	50.000.000	50.000.000	100,00
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	50.000.000	50.000.000	100,00
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	2.800.500.000	2.798.317.190	99,92
	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	2.400.500.000	2.398.398.940	99,91
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	400.000.000	399.918.250	99,98
10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	201.600.000	201.568.000	99,98
	Penyusunan Informasi Bursa Kerja	171.600.000	171.568.000	99,98
	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	30.000.000	30.000.000	100,00
11	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	460.800.000	453.914.300	98,51
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	175.000.000	168.194.500	96,11
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	235.800.000	235.719.850	99,97

	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	50.000.000	50.000.000	100,00
	JUMLAH	8.765.067.500	8.698.976.910	99,24

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2017 Penyusunan LAKIP masih banyak menemui kendala terutama yang berkaitan dengan pengukuran indikator outcome sehingga capaian kinerja dapat sedikit bias karena sulit untuk memperoleh data dan mengukur indikator diatas. Namun diharapkan LAKIP dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sehingga Visi : *"Terwujudnya Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif dan Berkualitas "* dapat terwujud.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan keberhasilan atau kegagalannya pencapaian indicator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai lebih dari satu program.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang selanjutnya ditulis sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodir dalam perencanaan serta program kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan prioritas dan pencapaian yang diwujudkan setiap tahunnya.

Semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi dan memberi arti optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan demi terwujudnya masyarakat transmigrasi dan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas ".

4.2 SARAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan Sumber Daya yang dimiliki dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi yang harmonis dalam maupun antara SKPD dan dengan berbagai stakeholder dalam kinerja kegiatan.
3. Memperhatikan dan berpedoman pada SOP dalam melaksanakan kinerja kegiatan.
4. Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan, agar visi dan misi serta program - program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal
5. Agar Indikator kinerja dapat ditetapkan secara tepat maka dukungan data yang akurat akan sangat menunjang. Untuk itu diperlukan personil yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Keperluan personil yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut agar didukung oleh penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya.
6. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.